**FUNGSI LEMBAGA WANITA HINDU DHARMA INDONESIA (WHDI)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN HINDU UNTUK
MENGHADAPI PERKEMBANGAN INDUSTRI 4.0**

(Tinjauan Komunikasi Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
Di Provinsi DKI Jakarta)

Oleh:

Nanda Rizka Saputri

(E-mail : nanskiiisaputri@gmail.com)

Untung Suhardi

(E-mail : usuhardi@gmail.com)

Anak Agung Oka Puspa

Abstract

This research intend to explain task and function from Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) DKI Jakarta organization, to know the WHDI organization programs of activities and review performance the role of WHDI organization empower the Hindus woman in DKI Jakarta Province to adaptation with dynamic industry 4.0. The type of this research use descriptive method from qualitative analysis. The technique to collect data with data reduction, display, verification and conclusion. From this research, researcher interview 4 informaces namely 3 WHDI organization managements and 1 woman activist from Sarinah. The result of this research show the WHDI organization program of activities rate have run of their role well in empowerment the Hindus womans in DKI Jakarta although only from particular field has been implemented and support factors to participation of Hindus woman to follow program empowerment of activities WHDI organization in DKI Jakarta including available support from religion figure and society figure in socialization process and implementation activities program. Written the short history how WHDI DKI Jakarta was built in the past as the references how the program and activity made.

Keywords : WHDI Organization, Empowerment Hindus Woman, Activities Program.

PENDAHULUAN

Jumlah populasi perempuan di Indonesia berdasarkan sensus nasional kependudukan 2014-2015 adalah 126,8 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk Indonesia per 2015 yaitu 252 juta jiwa. Pertumbuhan populasi perempuan trennya stabil ditambah upaya pemerintah untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan sudah membuahkan hasil yaitu mampu turun menjadi 359 per 1000. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala kini memiliki 9 agenda prioritas yang dinamai *Nawacita* sebagai proyeksi dalam memetakan pembangunan Indonesia (Wedhaswary, 2014). Didalamnya termaktub pembangunan manusia dan kebudayaan yang merupakan landasan dalam program pembangunan dan

pemberdayaan perempuan di Indonesia. Berikut adalah 9 agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo:

Nawacita poin pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Poin kedua yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Agenda prioritas ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Pada poin keenam disebutkan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Selanjutnya pada aspek kesembilan yakni memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga (Wedhaswary, 2014).

Secara spesifik pemberdayaan perempuan memang tidak ditulis secara gamblang, namun bentuk pembangunannya dibidang terutama bidang ekonomi dan pendidikan menjadi perhatian yang sangat penting. Bentuk perhatian tersebut dituangkan melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui beberapa agenda prioritas. Agenda yang pertama yaitu menjangkau isu perempuan yang telah menjadi isu internasional. *Gender mainstreaming*, *sustainable development*, dan *green goverment*¹ menjadi fokus isu internasional yang disoroti Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia walaupun masukan banyak hadir dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi perempuan dan anak juga turut aktif dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) juga mentargetkan *gender equality* yaitu gerakan *world 50:50* pada tahun 2030. Indonesia memprediksi perempuan mampu mengisi seluruh sektor strategis yang hari ini hanya diisi oleh kaum pria. Pentingnya keterwakilan perempuan disegala aspek baik politik dan pembangunan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Merujuk dari sifat alamiah perempuan yang mengedepankan estetika politik dalam melakukan peranannya (Anik, 2005), yaitu perilaku yang mampu mendengarkan dengan baik dan lebih peka dalam menganalisa sebuah persoalan, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan dari sebuah pembangunan.

Indonesia perkembangannya cukup pesat dalam menyadari pentingnya perempuan bergerak dan melakukan pembangunan salah satunya dengan pemberian ruang berekspresi dan mengembangkan diri melalui konsep keterwakilan. Keterwakilan perempuan disetiap sektor menjadi bukti kedewasaan sebuah bangsa terutama Indonesia yang hampir 3,5 abad terjajah. Tejah begitu lama tentu membekas dan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan dan pemaksimalan potensi perempuan Indonesia. Secara khusus Kementerian PP-PA

¹ Program Pembangunan Perempuan Indonesia. <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/26/1022/profile-perempuan-indonesia> Diakses 17 Desember 2016

membangun kordinasi dilintas sektor bersama kementrian dan lembaga terkait dalam membangun peran perempuan dalam pembangunan.

Menghadapi tantangan dan target masa depan dalam bersaing dan mengisi posisi strategis di tingkat nasional maupun internasional, ternyata fenomena yang terjadi dilapangan tidak demikian adanya. Angka partisipasi sekolah perempuan usia 16-18 tahun hanya 64,15%, dan yang mengejutkan hanya 20,14% perempuan Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi.² Lulusan terbanyak perempuan Indonesia berhenti pada jenjang Sekolah Dasar/Paket A sebesar 107,71. Data ini mengejutkan mengingat tantangan pasar bebas dan kompetisi didunia internasional terus membayangi anak bangsa. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara pusat pemerintahan dan ekonomi 0,61% perempuannya masih mengalami buta huruf. Selain itu, DKI Jakarta juga didaulat sebagai kota dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi yakni lebih dari 2552 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terjadi di DKI Jakarta.

Besarnya jumlah perempuan di Indonesia harusnya mampu dilihat sebagai peluang dan bonus besar. Peluang ini bisa ditangkap dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Pemberdayaan yang tepat mampu memaksimalkan peranan perempuan dalam pembangunan. Pemerintah merilis program pemberdayaan yang dikenal dengan PERINTIS, yakni Perempuan Inovator Indonesia yang diawali lahirnya 102 orang relawan dan mampu menemukan 1500 perintis di 34 Provinsi di Indonesia (3 orang disetiap provinsi). Oleh karena itulah, bahwa perempuan dalam hal ini juga sebagai agen perubahan yang nantinya akan menjadi bagian dari bentuk kekuasaan yang berujung pada kesejahteraan (Foucault, 2008).

Melihat peluang yang mampu dihadirkan oleh perempuan, ternyata sejalan dengan indeks pemberdayaan gender yang trennya cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu 70,46 dan provinsi tertinggi adalah Maluku yaitu 79,93 diatas DKI Jakarta sebesar 77,43. Angka ini harus bisa ditangkap sebagai *signal* positif besarnya kemauan perempuan Indonesia untuk diberdayakan. Lantas bagaimana peranan lembaga Hindu dalam merespon fenomena tersebut. Data pemeluk agama Hindu yang dirilis Badan Pusat Statistik dari hasil survey per 10 tahun, adalah 1,69% dari

²BPS. 2013. *Survey Sensus Nasional Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*.

total populasi nasional atau sekitar 4 juta jiwa. Perempuan Hindu tercatat 1.998.527 juta jiwa atau hanya selisih 15.062 dari pria Hindu di Indonesia. Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) sebagai satu-satunya lembaga Hindu yang memiliki peran strategis dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan Hindu harus mampu memaksimalkan peranannya. Perempuan dipandang besar peranannya untuk melakukan urusan domestik, tapi kita tidak pernah sadar bahwa peran domestik sesungguhnya penopang atau pondasi hadirnya eksistensi eksternal (Suhardi, 2015).

Tantangan umat Hindu kian besar, menghadapi kerasnya benturan konversi agama, perempuan sebagai figur yang memiliki tanggung jawab dalam penyiapan sarana dan prasarana upacara, dan yang paling penting yakni mengajar dan mendidik anak-anaknya. Kondisi sebuah bangsa dilihat dari kualitas perempuan dinegara tersebut - Jawaharlal Nehru. Masa depan kualitas generasi Hindu lahir dari rahim seorang perempuan dan pendidikan pertamanya jatuh dipangku seorang ibu (Suryaningsih, 2012). WHDI adalah salah satu organisasi wanita di Indonesia yang resmi diakui oleh pemerintah sebagai mitra dalam mensukseskan pencapaian tujuan ke 3, 4, dan 5 dari MDG (*Milenium Development Goals*), yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan. Tugas pokok organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wanita dalam berkarya melalui pembentukan ketahanan mental dan fisik, kesejahteraan material dan spiritual dalam kedudukannya sebagai umat Hindu dan Warga Negara Indonesia (Suharto, 2003). Untuk itulah, keberadaan organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia pada dasarnya adalah untuk memberikan penguatan kepada generasi Muda Hindu tentang pentingnya menjawab tantangan besar untuk kemajuan bangsa dan negara pada bidang agama. Bertolak pada pemikiran ini maka, organisasi wanita Hindu pada dasarnya bertujuan untuk memberikan penguatan kepada generasi muda, namun komunikasi yang dibangun membutuhkan perhatian khusus karena untuk menjalankan organisasinya membutuhkan manajemen komunikasi organisasi yang lebih yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri (Limarandani, 2018).

Organisasi ini berfungsi untuk menghimpun pemikiran di antara sesama anggotanya, serta saling berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan untuk memperkuat perannya sebagai seorang istri atau ibu di dalam keluarga melalui

pemberdayaan. Pentingnya keberadaan organisasi wanita sebagai bagian yang tidak terpisahkan lantaran sebagai penentu kebahagiaan dunia dan spiritual (Titib, 1998). Eksistensi perempuan sebagai bagian untuk membina generasi penerus karena merekalah yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan (Wiratmaja, 1991). Pembaharuan yang dapat kita telaah sekarang yang merupakan abad teknologi peran perempuan juga mempunyai fungsi vital lantaran sebagai bagian dari penggerak kehidupan. (Mas, 2002). Perkembangan abad ini sebagai bagian dari pencetus kekuasaan yang bercorak perubahan. Keberadaan WHDI adalah mutlak diperlukan dalam menggalang proses pembinaan umat Hindu terutama yang ada di DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut WHDI memiliki peranan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama perempuan Hindu agar mampu memaksimalkan peranannya sebagai istri, ibu, umat Hindu, dan anggota masyarakat yang baik melalui implementasi program kerja kepengurusan WHDI Provinsi DKI Jakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

- a. Bagaimana peran lembaga WHDI dalam pemberdayaan Perempuan Hindu di DKI Jakarta dalam menghadapi perkembangan industry 4.0?
- b. Apakah faktor pendorong dan penghambat implementasi program WHDI dalam pemberdayaan perempuan Hindu di DKI Jakarta untuk menghadapi perkembangan industry 4.0?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Untuk menganalisis peran lembaga WHDI dalam pemberdayaan Perempuan Hindu di DKI Jakarta
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program WHDI dalam pemberdayaan perempuan Hindu di DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara,

observasi dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2011). Dalam proses pengumpulan data, penulis akan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan referensi-referensi pustaka baik berupa buku-buku, jurnal, majalah, maupun catatan-catatan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan ini dipilih dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan karena dirasa sumber kepustakaan merupakan sumber penelitian yang stabil dan tidak reaktif serta sesuai dengan penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Sehingga melalui studi kepustakaan ini diharapkan penulis mampu mengkaji secara tajam dan mendalam. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Metode wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara dengan responden serta jawaban-jawaban yang dicatat dan direkam. Metode wawancara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, 1) wawancara bebas, 2) wawancara terpimpin, 3) wawancara bebas terpimpin (Sugiyono, 2011).

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap pengumpulan data melalui wawancara ini, model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*structure interview*) atau wawancara berencana, karena menggunakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan telah di persiapkan dulu secara matang. Selain itu pemilihan key informan ditentukan dengan melihat tokoh yang benar-benar memiliki wawasan yang sesuai dengan tujuan. Dengan demikian maka data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan data peneliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam hal ini dokumen bisa berbentuk, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2011).

Analisis Data dilakukan dengan mencapai tujuan penelitian, data yang akan dikumpulkan perlu dianalisis. Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti akan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, artinya data yang muncul berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh melalui pencatatan dan lain-lain kemudian disusun dalam bentuk teks yang perluas. Menurut Sugiyono (2012:89), analisis data

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

- a. Analisis Sebelum Dilapangan yakni Analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian sifatnya masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
- b. Analisis Selama di Lapangan Model Miles And Huberman, Miles dan Huberman (seperti dikutip Sugiyono, 2012:19), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam data meliputi:
- c. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang didapat dari data penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat ditarik.
- d. Penyajian data, Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Proses yang dilakukan yaitu dengan menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.
- e. Penarikan kesimpulan/ verifikasi, Kesimpulan adalah tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, arti, keteraturan, pola, penjelasan dan alur sebab akibat dari penelitian.
- f. Menulis laporan penelitian Laporan penelitian merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian. Setelah semua data terkumpul dan diolah, peneliti menulis laporan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis sehingga layak diajukan sebagai skripsi dan bisa dipertahankan dalam sidang skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah WHDI di Jakarta

Jumlah perempuan Hindu di DKI Jakarta tercatat 9.650 jiwa menurut survey kependudukan 2010. Jumlahnya memang tidak sebanyak pria, namun peranan yang dimiliki lebih beragam. Tantangan terbesar perempuan Hindu di Ibu Kota berada pada mereka yang sebagian besar sudah memiliki ruang kesadaran mengemban karier, turut andil dalam dinamika bermasyarakat, namun memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menugurus rumah tangga. Keberadaan ini sudah digariskan sesungguhnya bahwa garis keturunan umat Hindu di Jakarta mempunyai sejarah panjang terutama pada bentuk perjuangan perempuan untuk mewujudkan kehidupan tenteram. Hal ini kita sebut saja pada tahun 130M hiduplah perempuan dari anak seorang penjual priok yang nantinya menjadi permaisuri kerajaan Salakanegara sosok perempuan ini bernama Pohaci Larasati (Kutoyo, 1978; Saidi, 2002).

Perempuan Hindu di Jakarta tetap melaksanakan tata peribadatannya sesuai dengan tiga kerangka dasar umat Hindu, yakni tidak saja fokus pada tatwa dan etika, namun upacara. Memang porsi upacara kerap kali lebih besar dibanding pendalaman tattwa, maka disinilah peran WHDI DKI Jakarta akan terlihat signifikan dimana perempuan Hindunya tidak hanya pandai dalam membuat dan mempersiapkan sarana upacara, namun juga memiliki pemahaman tattwa yang komprehensif serta mendalam (Mandara, 2013).

Tantangan untuk memiliki pemahaman tatwa yang mendalam tidak hanya sebagai bekal individu perempuan Hindu tersebut untuk menyeberangi laut penderitaan seperti yang dituliskan didalam sastra, namun pemahaman agama mendalam yang dimiliki seorang perempuan terlebih seorang ibu akan mampu menjadi pembentang jalan kebahagiaan bagi putra-putrinya. Hal lain juga diungkapkan bahwa dimana perempuan dihormati maka pahala dalam keluarga tersebut akan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi bahagia (Puja, 2002).

Sebagai organisasi perempuan yang berskala nasional, WHDI seharusnya mampu menjadi pionir penggerak dan alat pendidikan bagi perempuan-perempuan Hindu di Indonesia khususnya DKI Jakarta yang merupakan ibu

kota negara, barometer Indonesia, terlebih wilayah kerja WHDI DKI adalah wilayah pemerintahan pusat, maka secara otomatis WHDI DKI Jakarta memiliki kesempatan lebih banyak untuk terlibat dalam skala nasional. Melalui pemaksimalan peranan dalam mengejawantahkan visi – misi WHDI akan menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalisasi peranan WHDI DKI Jakarta dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan Hindu.

Sebuah kesempatan yang luar biasa peneliti mewawancarai pendiri sekaligus pencetus gagasan mengenai konsep organisasi perempuan Hindu ini. Ibu Ketut Suratmini, mantan Dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta mendapatkan semangat untuk membentuk WHDI sejak beliau mengajar disana. Sekitar tahun 90an sampai dengan tahun 2000 organisasi perempuan Hindu di Jakarta hanya ada PWSHD (Perkumpulan Wanita Suka Duka Hindu Dharma). PWSHD memiliki konsentrasi isu pada kegiatan seputar keagamaan dan keumatan Internal Hindu dan belum ada satupun yang terdaftar di KOWANI.

Ketidakhadiran organisasi perempuan Hindu dilevel nasional membuat Perempuan Hindu terbatas representasinya. Banyak ruang-ruang menyampaikan aspirasi terlewat karena peranan organisasi yang dimiliki saat itu hanya berfokus pada kegiatan internal keumatan, sehingga ruang gerak dan eksistensi masih sangat minim dilakukan. Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang Ibu Ketut Suratmini bersama para tokoh perempuan lainnya, tercatat nama-nama seperti ibu Arini Suyasa, Ibu Gusti Putra Astaman dan Bapak Made Sutresna yang juga turut mengawal dan membantu meneruskan gagasan ini dengan menghimpun segala potensi perempuan Hindu di Jakarta untuk bersatu dan membentuk organisasi perempuan Hindu.

Gagasan ini tidak berjalan mulus, hambatan pembentukan, penolakan terjadi dalam waktu bertahun-tahun. Pembentukan organisasi perempuan Hindu dinilai akan tumpang tindih karena sebenarnya telah ada PWSHD dan nyata memang peranannya di DKI Jakarta. Peran PWSHD saat itu dinilai sudah tepat dan mampu mengakomodir potensi perempuan Hindu. Penyampaian gagasan yang kerap kali dilakukan di rapat-rapat pertemuan seluruh organisasi internal keumatan Hindu selalu dimentahkan dan berujung pada kebuntuan.

Penyampaian usulan pembentukan organisasi Perempuan Hindu pertama kali dilontarkan Ibu Ketut Suratmini pada Mahasabha PHDI dengan Dirjen Bimas Hindu Pak Agung sekitar tahun 1990an akhir menuju tahun 2000. Usulan tersebut ditanggapi namun belum ada kepastian dukungan untuk membentuk organisasi tersebut. Saat kembali ke Jakarta dan menghimpun kekuatan pengurus, Ibu Ketut mendapatkan penolakan dari para tokoh dan PWSHD DKI Jakarta. Pembentukan organisasi Perempuan Hindu dianggap akan menutup peran sekaligus tumpang tindih peranan dengan PWSHD, sehingga niat tersebut kembali terhenti. Penolakan juga muncul dari para tokoh, bapak-bapak dari organisasi keumatan yang saat itu khawatir apakah WHDI mampu berperan dan berkembang dengan baik nantinya mengingat tugas pokok dan kewajiban perempuan yang saat itu mobilitasnya dinilai akan mengganggu jalannya organisasi.

Menurut para tokoh, keterwakilan perempuan Hindu dieksternal belum dianggap terlalu penting untuk dilakukan karena focus utamanya adalah pelaksanaan kewajiban diinternal keumatan yang memang banyak dan padat. Pendekatan demi pendekatan terus dilakukan, sampai akhirnya kepemimpinan PWSHD yang diketuai oleh ibu Wayan Metra menyetujui pembentukan WHDI DKI Jakarta. Bulan April tahun 2001 Ibu Ketut Suratmini Bersama seluruh pengurusnya melakukan deklarasi pembentukan WHDI DKI Jakarta. Deklarasi tersebut mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi Bali dan beberapa tokoh di sekitar Jabodetabek. Dukungan tersebut juga termasuk biaya melakukan peliputan.

Ide melakukan deklarasi disiasati dengan mengundang TVRI untuk meliput deklarasi tersebut, sehingga kabar terbentuknya WHDI DKI Jakarta tersebar keseluruh Indonesia. Tepat 21 April 2001 di hari Kartini lahir organisasi perempuan Hindu Nasional di Indonesia, WHDI DKI Jakarta terbentuk. Konsep deklarasi yang sangat visioner ini lahir atas semangat memperjuangkan keterwakilan perempuan Hindu di Indonesia. Pasca dideklarasikannya WHDI DKI Jakarta, ketua terpilih Ibu Ketut Suramini melakukan duduk bersama ketua PWSHD Ibu Wayan Metra dan Ketua PHDI DKI Jakarta saat itu untuk menyepakati beberapa hal. Hal yang paling kontroversial selama ini adalah

adanya *overlapping* peranan diantara PWSHD dengan WHDI DKI Jakarta. Pembicaraan saat itu kemudian mendapatkan hasil bahwa PWSHD DKI Jakarta akan melakukan peranan disegala urusan internal keumatan. Tugas *ngayah*, *bebantenan* dan urusan keupakaraan akan dilakukan oleh PWSHD DKI Jakarta. Sedangkan WHDI DKI Jakarta akan fokus mengambil peranan perempuan Hindu di Eksternal seperti hadir di diskusi dan undangan KOWANI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan dan beberapa agenda lainnya.

Fokus WHDI DKI Jakarta saat itu adalah menyuarakan hak waris dan pengembangan kapasitas sumberdaya perempuan Hindu. Beberapa bulan pasca deklarasi WHDI DKI Jakarta, diselenggarakannya Musyawarah Nasional WHDI Nasional dan memilih Ibu Putra Astaman sebagai ketua WHDI Pusat yang pertama dan menunjuk Ibu Ketut Sumartini sebagai Sekretaris Jenderal. Pasca pembentukan WHDI Pusat, dibentuklah bidang khusus yang hendak merumuskan Visi-Misi, AD/ART, GBHO dan beberapa ketentuan organisasi.

Usai terbentuk sekala Nasional, WHDI hadir dengan cita sebagai wadah pengembangan kualitas sumber daya perempuan Hindu terutama untuk melihat berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat umat Hindu. Organisasi ini ada untuk melihat segala macam persoalan, baik pribadi maupun orang banyak. Aktifitas program kegiatan organisasi WHDI DKI diadakan setiap bulan. Karena baru terbentuk jelas banyak hambatan yang ada terutama mengenai dana. Namun, semangat untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan eksistensi sangatlah besar membuat WHDI DKI Jakarta sangat kuat dan mampu membangun jejaring dengan berbagai organisasi perempuan lainnya. Dukungan satu persatu didapatkan dan demikian hari semakin dikenal.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah secara natural, PWSHD DKI Jakarta justru kian tak terdengar. Banyak orang mengira bahwa PWSHD DKI Jakarta melebur bersama WHDI DKI Jakarta padahal bukan itu yang terjadi dan nyatanya sampai sekarang PWSHD DKI Jakarta masih ada dan berkegiatan. Hasil pembicaraan antara Ketua WHDI DKI dan Ketua PWSHD DKI Jakarta saat itu ternyata sepakat membagi peranan, dan PWSHD hendak dijadikan salah satu embrio dibawah naungan WHDI DKI sebagai salah satu bidang

pengembangan peran perempuan diinternal keumatan. Hal ini yang sepertinya membutuhkan kajian lebih mendalam Karena ternyata kondisi yang sekarang terjadi justru memperlihatkan peranan WHDI DKI Jakarta yang melakukan fungsinya sebagai PWSHD DKI Jakarta. Sehingga jelas memang, ada pembagian peran antara WHDI dan PWSHD DKI Jakarta. Bukan melebur, melainkan adanya pembagian peranan dalam memberikan kontribusi kepada umat maupun perempuan Hindu secara khusus. Dalam melihat bagaimana WHDI DKI Jakarta menjalankan peranannya dalam pemberdayaan perempuan Hindu dapat dilihat dari 4 aspek kendali organisasi berikut:

1. Kendali Sederhana

Kendali sederhana merupakan aspek yang fundamental, karena pengertiannya dimaksudkan untuk melihat fungsi jalannya kepemimpinan dalam sebuah organisasi sesuai dengan posisi jabatan yang dimiliki pengurus tersebut (Atmadja, 2010). Setiap jabatan memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk peran vital seorang pucuk pimpinan dalam memberikan perintah, arahan, maupun penyampaian informasi.

Dalam observasi peneliti melalui rapat kordinasi yang dilakukan WHDI DKI Jakarta dalam rangka persiapan Musyawarah Daerah pada tanggal 19 Mei 2017. Rapat dilaksanakan di Gedung Dharmasevanam Rawamangun Jakarta Timur. Rapat saat itu dipimpin oleh ibu Agung Putri selaku penasehat dalam struktur kepanitiaan Musyawarah Daerah. Rapat dilaksanakan sangat dinamis, dan ruang-ruang berpendapat diberikan. Walaupun beranggotakan hampir perempuan paruh baya, peneliti melihat semangat yang luar biasa dari para wanita Hindu disana. Setiap hal dibahas dan saran serta usulan banyak diberikan. Akan lebih dinamis pastinya jikalau banyak anak muda, terutama perempuan Hindu muda yang bias berperan aktif dan berpartisipasi bergabung dengan organisasi WHDI DKI Jakarta pastinya.

2. Kendali Teknis

Dari segi pengendalian teknis, yaitu pemanfaatan teknologi sebenarnya WHDI DKI sudah mulai peka dengan situasi perkembangan zaman yaitu dengan adanya grup *whatsapp* yang semakin memudahkan bentuk koordinasi (Soyomukti, 2012). Pemanfaatan teknologi hanya sebatas komunikasi, belum mampu digunakan untuk meningkatkan eksistensi (Nugraha, 2014). Dikatakan bahwa terbatasnya sumber daya yang memang memiliki waktu penuh kerap kali menjadi kurang maksimal dalam pengendalian teknis ini. Kendali teknis memang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan eksistensi dan efektifitas program yang selama ini dilakukan hanya sebatas menghadiri undangan pertemuan dan aktif dalam diskusi dengan eksternal (Basit, 2014). Namun hal ini juga memiliki kendala dikarenakan pengurus WHDI DKI yang juga sebagian adalah pengurus WHDI Pusat sehingga fokus menjadi terbagi.

3. Birokrasi

Dari segi birokrasi, WHDI DKI Jakarta tidak memiliki peraturan-peraturan tertulis yang sifatnya baku (Ardianto, ect, 2017). Semua keputusan dan peraturan dihasilkan dari kesepakatan bersama dengan seluruh pengurus. Banyak data ataupun laporan secara administratif belum tersusun secara rapih karena pergantian pengurus yang seringkali terjadi. Pembukuan yang tidak tersusun rapi dari kepengurusan sebelumnya kepada kepengurusan berikutnya akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan evaluasi (Cangara, 2013; Iriantara, 2004).

Tetapi secara prosedural, WHDI DKI tetap melakukan kendali yang sifatnya patuh administrasi seperti adanya surat undangan maupun absensi saat rapat maupun pertemuan. Proses birokrasi sebagai bagian dari upaya pembinaan para tokoh WHDI dalam penyebaran kesadaran umat untuk memperdalam ajaran agama Hindu. Proses pembinaan ini dapat berupa strategi sad dharma yang sering digunakan oleh penyuluh dalam melakukan pembinaan umat pada umumnya .

4. Konsertif

Ditinjau dari Kendali konsertif, hubungan interpersonal antar pengurus amat baik, dibuktikan dengan hubungan kerja yang sangat dinamis dan dilandasi dengan kesepakatan bersama (Ritzer, 2005). Dari segi pemaknaan nilai dapat ditinjau dari bergabungnya pengurus yang tak lain karena diyakini memiliki satu visi atau nilai bersama. Terkait hubungan interpersonal peneliti melihat ikatan emosional dibangun melalui kegiatan-kegiatan informal seperti *Tirta Yatra* ke beberapa tempat ibadah diberbagai wilayah. Selain melakukan kunjungan, hal ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan dan mempererat ikatan emosional antar pengurus (Kurniasari, 2017). Hal ini dapat dilihat melalui adanya kunjungan WHDI DKI Jakarta dalam melakukan *Tirta Yatra* pada 25-30 Agustus 2016. Aktivitas ini kerap dilakukan dan selalu terlaksana dengan antusias terlihat dari beberapa dokumentasi yang peneliti dapatkan dari beberapa akun sosial media pengurus WHDI DKI Jakarta yang diunggah usai kegiatan berakhir.

Berkut dengan kegiatan sosial, kegiatan informal seperti ini memang diperlukan untuk mempererat ikatan emosional diantara para pengurus. Melihat dari alasan yang dituturkan oleh ibu Oka Harmini salah satu pengurus bahwa unsur *ngayah* sangat dikedepankan dalam organisasi ini, sehingga ikatan emosional yang erat dibutuhkan dalam menjaga harmonisasi dinamika organisasi.

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI FUNGSI PHDI DI ERA DIGITAL

a) Faktor Pendorong

Dalam implementasi program pemberdayaan perempuan oleh WHDI DKI Jakarta dapat dilihat dari faktor pendorong yang dikemukakan oleh Donald. P. Warwick dalam Syukur Abdullah yakni:

1. Kemampuan Organisasi

Dalam tahap implementasi program diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan pada salah satu unit organisasi. Melalui programnya, WHDI DKI

Jakarta sebenarnya memiliki peranan yang cukup besar, ditambah pengurus memiliki kemampuan dan posisi karir yang strategis.

Kemampuan organisasi meliputi kemampuan teknis, menjalin hubungan dengan orang lain dan organisasi lain. Melihat kemampuan membangun jaringan eksternal, WHDI memiliki nilai tawar yang strategis karena menjadi satu-satunya organisasi perempuan Hindu yang berskala nasional. Terdaftar di dalam KOWANI dan aktif dalam membina hubungan bersama organisasi perempuan lainnya yang tergabung dalam KOWANI.

2. Dukungan dari Organisasi Lain

Hampir semua pengurus WHDI DKI Jakarta adalah Perempuan Hindu yang memiliki karir dengan posisi strategis dan berpengalaman dalam keterlibatan dengan organisasi berskala nasional. Hal ini yang kemudian membuat para pengurus WHDI DKI Jakarta memiliki jejaring yang luas dengan lembaga lainnya.

Selain itu, peran domestik WHDI DKI Jakarta yang sebagian besar berhubungan dengan keumatan secara tidak langsung membangun ikatan emosional antara WHDI DKI Jakarta dengan organisasi lain, khususnya organisasi keumatan Hindu. Tidak seperti dahulu yang kerap kali mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai ancaman, kini WHDI DKI Jakarta justru peranannya banyak didukung, salah satunya dengan dukungan dana dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan narasumber WHDI DKI Jakarta masih menggunakan dana pribadi pengurus masing-masing jika ingin berkegiatan, namun pasca melebarkan eksistensi kian lama mendapat perhatian dan terdaftar sebagai penerima dana.

3. Faktor Penghambat

Dari empat faktor yang dikemukakan Warwick, penulis menemukan 2 faktor penghambat yaitu terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda dan kerumitan dalam program itu sendiri. Loyalitas ganda ditemukan karena adanya rangkap jabatan yang diemban oleh pengurus WHDI DKI Jakarta dan WHDI Pusat. Selain itu faktor Kendala Teknis sangat dominan hadir meliputi keterbatasan dana dan sumber daya yang belum mempunyai untuk menekuni

bidang tersebut. Dari lima bidang yang dimiliki dalam struktur WHDIDKI Jakarta, tidak semuanya mampu terimplementasikan dan cenderung hanya berfokus pada satu sampai dua program kerja saja. Seperti yang peneliti dapatkan dari dokumentasi kegiatan, beberapa aktivitas organisasi bertumpu pada bidang agama yaitu upacara dan bidang sosial yakni aktivitas bhakti social (Krisna, 2018).

Kegiatan yang dilaksanakan frekuensinya paling banyak adalah kegiatan Bhakti Sosial (Hendropuspito, 2000). Kegiatan ini dinilai sebagai agenda kegiatan rutin yang diharapkan sebagai upaya menumbuhkan rasa empati diantara para pengurus WHDI DKI Jakarta. Kegiatan WHDI DKI Jakarta kerap kali dilakukan bersama dengan WHDI Pusat. Kendala selain tanggung jawab ganda, yakni tanggung jawab untuk memenuhi pembiayaanpun menjadi salah satu penghambat. WHDI DKI Jakarta memiliki peranan yang sangat strategis sebagai organisasi dengan visi terwujudnya wanita Hindu yang mandiri, cerdas, santun dan berbudi pekerti luhur dengan budaya organisasi modern (Suhardi, 2018). Visi ini harus dipahami secara mendalam oleh seluruh pengurus agar program kerja dapat terimplementasi dengan baik. Dalam memahami visi dan misi perlu adanya kesadaran untuk membuat organisasi ini bertahan dari modernisasi namun tetap berjalan dalam nilai fundamentalnya.

Peran melakukan pemberdayaan Perempuan Hindu tidak hanya untuk eksistensi organisasi, melainkan bentuk investasi generasi Hindu masa depan (Suhardi, 2014). Dalam pelaksanaannya memang tidak dipungkiri jika menemui banyak keterbatasan. Keterbatasan dalam sumberdaya membuat WHDI kerap kali dipandang Dalam melihat peranannya melakukan pemberdayaan kepada perempuan Hindu dapat dilihat melalui 4 aspek

Seiring berjalannya waktu, kini WHDI cenderung terlihat lebih fokus pada peran domestiknya saja yang sesungguhnya adalah konsentrasi dari sebagian fokus pergerakan WHDI. Kurang terlihat signifikansi bagaimana WHDI membangun eksistensinya dan bersuara lantang mengenai isu terhadap permasalahan Perempuan, terutama Perempuan Hindu padahal banyak yang sudah dilakukan, hal ini terjadi karena kurang maksimalnya WHDI DKI

Jakarta dalam mengemas dan mendokumentasikan kegiatannya sehingga dapat dilihat dan diakui eksistensinya lebih dalam. Bicara belum adanya organisasi perempuan Hindu, sesungguhnya saat itu sudah ada PWSHD DKI Jakarta. Namun jelas, nilai yang sebenarnya ingin dibangun tidaklah sama.

Pemaknaan akan nilai fundamental mengapa WHDI harus ada dan akan dibawa kemanakah organisasi ini kedepan, harus dilakukan dengan membaca kosep dan garis-garis besar haluan organisasi. Dapat dilihat dari indikator lain yakni kendali teknis dan Birokrasi. Dua kendali ini menjadi penting karena jika organisasi tidak mampu melakukannya dengan optimal akan berimplikasi pada hadirnya faktor penghambat dalam implementasi program. Sulitnya menginventarisir data serta dokumen terjadi bukan karena ketidakmampuan, namun lebih kepada banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pengurus (Koeswinarno, 2015). Dalam wawancara peneliti dengan narasumber beliau menuturkan bahwa baru saja ia menyerahkan empat album dokumentasi WHDI. Album-album tersebut terdiri dari tiga album kegiatan Musyawarah Nasional WHDI Pusat dan satu album lainnya adalah album musyawarah daerah WHDI DKI Jakarta. Album tersebut hilang dan sangat disayangkan membuat sejarah menjadi sedikit sulit untuk ditulis kembali. Selain kendali teknis, memperkuat kendali konsertif menjadi hal yang amat penting.

Kendali konsertif dalam WHDI DKI sudah terlihat baik dan akan menjadi optimal jika mampu dilandasi dengan pemahaman nilai fundamental yang diusung WHDI. Sebagai organisasi non profit, pengurus biasanya dekat secara emosional karena adanya kesamaan visi ketika berjalan dalam organisasi tersebut. Peneliti melihat belum optimalnya para pengurus dalam melihat konsep atau nilai fundamental yang sesungguhnya ingin diwujudkan WHDI DKI Jakarta sejak semangat besar yang melatarbelakangi hadirnya organisasi perempuan Hindu tingkat nasional ini. Jika pemahaman akan visi misi WHDI DKI Jakarta dimaknai dengan tepat maka penguatan dalam kendali konsertif akan sangat maksimal dalam membantu menguatkan dan mengembangkan eksistensi organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Peranan Organisasi WHDI DKI Jakarta dalam pemberdayaan perempuan Hindu belum optimal ditinjau dari Kendali Sederhana, organisasi dijalankan dengan sangat dinamis, khas perempuan yang memberikan banyak ruang diskusi sebelum pengambilan keputusan hal ini yang harus dipertahankan oleh WHDI DKI Jakarta dalam menjaga performa organisasi. Kendali Teknis, setelah melakukan penelitian terlihat bahwa penggunaan alat-alat teknologi untuk memudahkan kerja masih belum dioptimalkan. Teknologi hanya dipergunakan sebatas komunikasi dan belum dipergunakan untuk meningkatkan eksistensi organisasi. Kendali Birokrasi, tertib administrasi, kelengkapan *document* termasuk tersimpannya laporan pertanggung jawaban masih belum baik terlebih karena banyaknya *overlapping* para pengurus dengan kewajiban organisasi sehingga beberapa dokumen masih belum terkumpul baik dan lengkap. Kendali Konsertif, ditemukan bahwa WHDI tumbuh sangat dinamis, namun pemahaman nilai-nilai fundamental dari visi-misi masih belum mendalam sehingga fokusnya sementara pada urusan domestik internal keumatan.
2. Ditemukan Faktor pendorong WHDI dalam melakukan pemberdayaan Perempuan Hindu adalah kemampuan organisasi yang diisi dengan sumber daya yang memiliki posisi strategis juga besarnya dukungan dari organisasi lainnya. Faktor penghambat yang muncul adalah adanya tanggung jawab atau komitmen ganda dari pengurus WHDI DKI Jakarta. Sehingga penguatan dalam kendali konsertif akan sangat maksimal dalam membantu menguatkan dan mengembangkan eksistensi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, F. dan S. M. (2005). *Perempuan dan Politik* (I). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ardianto, Elvinaro, Lukiat Komala, S. K. (2017). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (I). Bandung: Refika Offset.
- Atmadja, N. B. (2010). *Genealogi Keruntuhan Majapahit Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali* (I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basit, A. (2014). Tantangan profesi penyuluh agama islam dan pemberdayaannya, XV(1), 157–178.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (I). Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from www.rajagrafindo.co.id
- Foucault, M. (2008). *Ingin tahu Sejarah Seksualitas* (I). Jakarta: Yayasan Obor.
- Hendropuspito. (2000). *Sosiologi Hindu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iriantara, Y. (2004). *Manajemen Strategis Public speaking*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koeswinarno, K. D. A. N. (2015). Penyuluh Agama : Menuju Kinerja Profesional The Religious Councelor : Towards Professional Performance, V(2), 173–186.
- Krisna, D. K. dan U. S. (2018). KAJIAN BENTUK DAN FILOSOFIS BERBUSANA UMAT HINDU ADAT BALI DALAM MEWUJUDKAN BHAKTI DAN SRADDHA DI PURA ADITYA JAYA RAWAMANGUN. *Vidya Sandi*, 9(1).
- Kurniasari, N. G. A. K. (2017). *Nilai-Nilai Perempuan Hindu Bali dalam Ranah Komunikasi Politik* (Vol. 622).
- Kutoyo, S. (1978). *Sejarah Daerah DKI Jakarta*. (et all Kartadarmadja, Soenjata, Ed.) (I). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Limarandani, Ni Putu, A. P. (2018). *Pemaknaan Perkawinan Nyerod Di Bali*. (U. Suhardi, Ed.) (Edisi 1). Depok: Rajawali Pers.
- Mandara, I. W. K. (2013). *Makna Tawur Agung dalam Rangkaian Pelaksanaan Nyepi di DKI Jakarta*. Denpasar.
- Mas, A. G. R. (2002). *Perkawinan yang Ideal* (I). Surabaya: Paramita.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). Bandung: Remaja Rosadaya.
- Nugraha, F. (2014). Penyuluh Agama Transformatif : Sebuah Model Dakwah, (June 2013).
- Puja, G. T. rai S. (2002). *Weda Smrti Compedium Hukum Hindu* (II). Jakarta: CV Felita Nursatama Lestari.
- Ritzer, G. (2005). *Teori Sosial Postmodern*. (N. A. Maulana, Ed.) (III). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Saidi, R. (2002). *Babad Tanah Betawi* (I). Jakarta: PT. Gria Media Prima.
- Soyomukti, N. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Aruzz-Media.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development)* (12th ed.). Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardi, U. (2014). Tujuan Kehidupan Manusia: Tinjauan Filsafat Kebahagiaan Menurut Epikuros Dan Catur Purusartha. *PASUPATI Jurnal Ilmiah Kajian Hindu Dan Humaniora*, 5(6).
- Suhardi, U. (2015). *Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Kitab Sarasamuccaya (Kajian Etika Hindu)* (I). Surabaya: Paramita.
- Suhardi, U. (2018). Etika Komunikasi dalam Veda (Tinjauan Fenomenologi pada Era

- Globalisasi). *PASUPATI Jurnal Ilmiah Kajian Hindu Dan Humaniora*, 5(1), 61–80.
- Suharto, E. (2003). *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* (I). Bandung: Mizan.
- Suryaningsih, W. (2012). *Peranan Organisasi WHDi dalam Pemberdayaan Wanita Hindu di Kampung Jati Datar mataram, Kecamatan bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung.
- Titib, I. M. (1998). *Citra Perempuan dalam Kakawin Ramayana (Cerminan Masyarakat Hindu tentang Wanita)* (I). Surabaya: Paramita.
- Wedhaswary, I. D. (2014). Nawa Cita 9 Agenda prioritas Jokowi-JK. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read2014/05/21/0754454/nawa.cita.9.agenda.prioritas.Jokowi-JK>
- Wiratmaja, A. G. (1991). *Perempuan Hindu dalam Suatu Proyeksi* (I). Bandung: Ganeca Exact.